

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan bangsa. Seperti yang dikatakan oleh para ahli, bahwa pembangunan negara-negara berkembang menjadi negara industri berhasil jika didukung oleh adanya sumber daya manusia yang terdidik dalam jumlah yang memadai. Sebuah bangsa dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, melalui pendidikan.

Pendidikan adalah salah satu cara untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia mensejahterakan masyarakat di dalam suatu bangsa. Agar pendidikan tidak tertinggal dan termakan oleh zaman, pada era saat ini dibutuhkan sebuah inovasi ataupun perubahan baru untuk pendidikan.

Pendidikan yang berkualitas membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana pendidikan merupakan fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar yang bertujuan agar pembelajaran tercapai. Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting untuk menunjang kelancaran atau kemudahan dalam proses pembelajaran. Sarana pendidikan merupakan fasilitas-fasilitas yang penting dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.

Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam peningkatan prestasi belajar siswa. Gedung, kelas, meja, kursi, serta alat maupun media pengajaran lainnya merupakan peralatan ataupun perlengkapan yang menjadi sarana untuk menunjang proses pendidikan. Adapun halaman, kebun, taman, jalan menuju sekolah merupakan prasarana atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Tetapi jika prasarana tersebut digunakan secara langsung seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, dan halaman sekolah untuk lapangan olahraga maka itu termasuk prasarana pendidikan.

Pengadaan sarana prasarana merupakan tanggung jawab pemerintah, yang di distribusikan melalui Dinas Pendidikan. Untuk dapat merealisasikan ataupun melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ini, perlu dilakukan penyusunan anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang pendidikan. Oleh karena itu, setiap tahunnya Dinas Pendidikan harus menganggarkan alokasi biaya pengadaan sarana prasarana pendidikan. Penganggaran merupakan proses yang cukup sulit pada organisasi sektor publik, termasuk di antaranya pemerintah daerah. Anggaran sektor publik merupakan suatu instrumen akuntabilitas yang berfungsi untuk pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program (Putra, 2015).

Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan

perencanaan yang telah disusun. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

Dalam mengalokasikan dana anggaran pendidikan, peran pemerintah sangatlah penting untuk menyusun anggaran serta mengalokasikan dana anggaran pendidikan tersebut. Perencanaan penyusunan anggaran dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

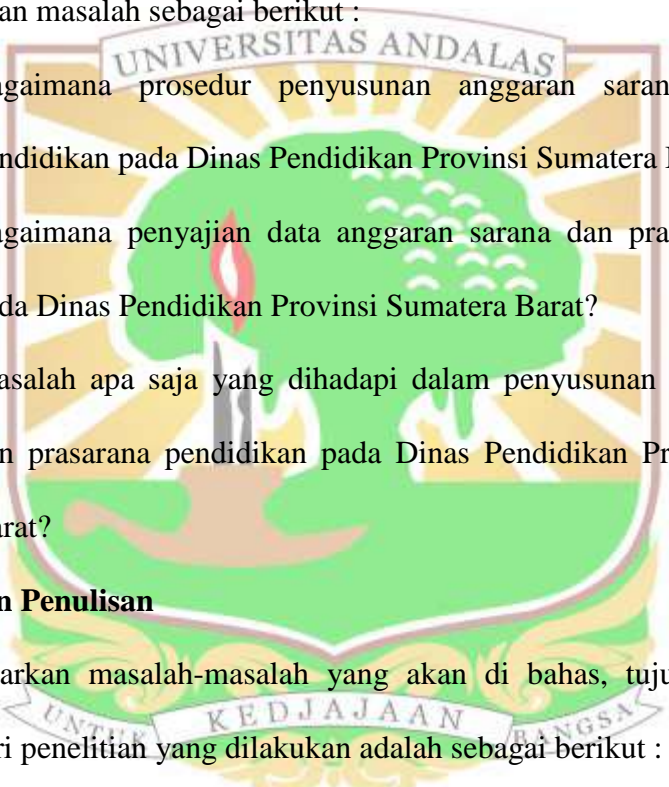
Dinas pendidikan harusnya menyusun langkah yang tepat dan baik untuk perencanaan dan penganggaran, agar Dinas Pendidikan dapat meningkatkan dan memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat dengan baik dan tepat pula. Fasilitas pendidikan menjadi hal utama yang di bidik dalam pengelolaan pendidikan. Ketersediaan fasilitas yang digunakan sebagai penunjang pendidikan merupakan hal yang sangat krusial sehingga harus diadakan. Semua fasilitas yang digunakan sebagai pendukung dalam pendidikan merupakan sarana dan prasarana pendidikan. Penyusunan anggaran sangat diperlukan sebagai penunjang pendidikan di Provinsi Sumatera Barat agar pengadaan sarana dan prasarana pendidikan terlaksana dan terealisasi. Anggaran tersebut tentunya dibutuhkan dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan. Agar anggaran dapat terwujud sesuai dengan yang direncanakan, maka penyusunan anggaran tersebut diharapkan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, diperlukan prosedur penyusunan anggaran sarana dan prasarana pendidikan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan dan biaya yang dibutuhkan dan sebagai acuan untuk memnuhi kebutuhan tersebut.

Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut prosedur anggaran tersebut penulis mengangkat sebuah judul yaitu, “ **Prosedur Penyusunan Anggaran Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan Sumatera Barat**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- 
1. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran sarana dan prasana pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
  2. Bagaimana penyajian data anggaran sarana dan prasana pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat?
  3. Masalah apa saja yang dihadapi dalam penyusunan anggaran sarana dan prasarana pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan masalah-masalah yang akan di bahas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan anggaran sarana dan prasana pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui penyajian data anggaran sarana dan prasana pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

3. Untuk mengetahui masalah apa saja yang dihadapi dalam penyusunan anggaran sarana dan prasarana pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Pengharapan dari penulisan yang dilaksanakan ini adalah memberikan beberapa manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Bagi penulis laporan ini adalah menambah ilmu dan wawasan mengenai prosedur penyusunan anggaran sarana dan prasana pendidikan

2. Bagi Akademik

Dapat menambah kepustakaan dan dapat memberikan masukan khususnya mengenai penyusunan anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

3. Bagi Instansi

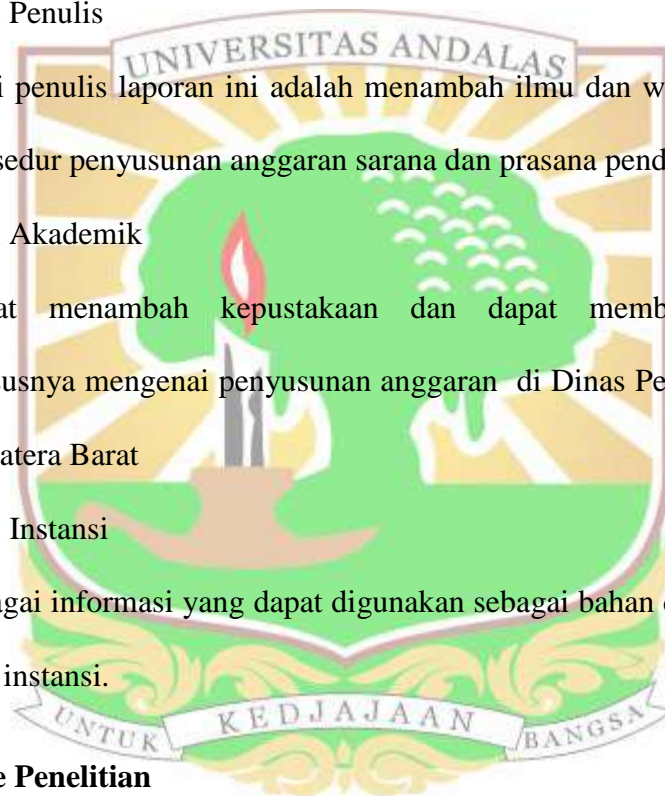
Sebagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan dan pertimbangan bagi instansi.

#### **1.5 Metode Penelitian**

1. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mengumpulkan serta membaca berbagai literatur untuk mendapatkan berbagai teori yang diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan.

2. Studi Lapangan





Pengumpulan data dilakukan secara langsung pada instansi terkait yang bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis dalam proses penyusunan. Adapun Teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Melakukan pengamatan secara langsung pada kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi.
- b. Melakukan wawancara terhadap karyawan
- c. Mengumpulkan dokumen-dokumen terkait.

### 3. Metode Analisis

Penelitian dilakukan untuk menganalisis teori yang telah dipelajari dengan kenyataan yang terjadi dilapangan yang menjadi dasar untuk pengambilan kesimpulan serta saran.

### 1.6 Tempat dan Waktu Magang

Penulis melaksanakan magang di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No 52, Jati Baru, Kec. Padang Timur Sumatera Barat Telp (0751) 31513. Waktu kegiatan magang dilaksanakan 40 hari kerja yaitu dari hari Senin s.d hari Jumat yang dimulai dari tanggal 9 Januari s.d 6 Maret 2023.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang setiap bab dibagi menjadi sub bab yang menjadi kesatuan kerangka pemahaman masalah yaitu yang pertama adalah Bab I pendahuluan

terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Selanjutnya adalah Bab II yang berisi landasan teori membahas secara rinci tentang pengertian prosedur, pengertian penyusunan, pengertian anggaran, fungsi anggaran, manfaat anggaran, tujuan anggaran, pengertian sarana dan prasarana, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan Bab III adalah gambaran umum instansi tempat melaksanakan magang yang menjelaskan sejarah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dasar hukum berdirinya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Pada bab IV berisi penjelasan bagaimana prosedur penyusunan anggaran sarana dan prasarana pendidikan, dan permasalahan yang dihadapi dalam menyusun anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. dan dilanjutkan ke bab V yaitu penutup tentang kesimpulan dari prosedur penyusunan anggaran yang digunakan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

